

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

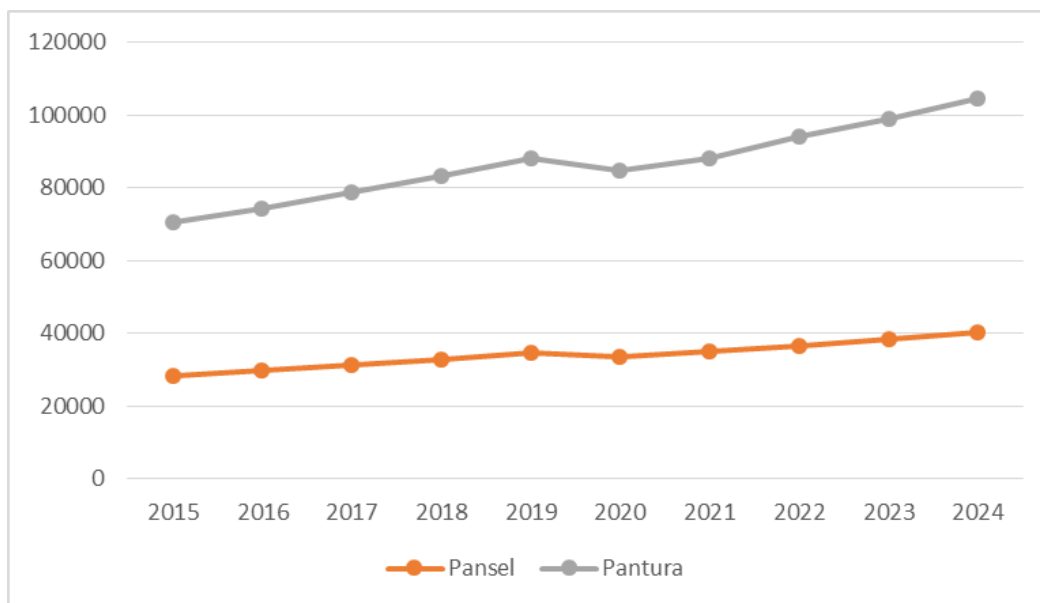
Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi negara mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu, apabila tidak dikelola dengan stabil dan konsisten. Peningkatan output ekonomi riil suatu wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menunjukkan tren ekonomi yang positif. Secara operasional, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh PDRB ADHK yang menjelaskan terkait kondisi ekonomi suatu wilayah. Perkembangan ekonomi memiliki makna yang luas sehingga tidak terbatas pada peningkatan output tapi menggambarkan bagaimana transformasi ekonomi berkelanjutan suatu negara (Efendi *et al.*, 2024).

Pertumbuhan pada PDRB tidak hanya ditentukan oleh faktor internal saja, tentu perlu beberapa peran dari investasi serta kualitas manusianya. Saat ini kontribusi pertumbuhan terbesar di Indonesia masih dipegang oleh pulau Jawa karena menjadi pulau terluas dengan penduduk paling banyak setelah DKI Jakarta, Jawa Timur berada di urutan kedua sebagai penyumbang kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (Dinas Kominfo, 2023). Struktur ekonomi daerah tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa. Namun, kontribusi sektor ekonomi belum merata ke seluruh wilayah pertumbuhan signifikan hanya di kawasan industri saja. Oleh karena itu, dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 menjadikan akselerasi baru dalam fokus peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir selatan Jawa Timur.

Jalan Lintas Selatan sebagai koridor baru dalam upaya peningkatan PDRB daerah. Dimana dalam upaya tersebut pemerintah biaya logistik mengecil sehingga output perekonomian lokal dapat meningkat. Pertumbuhan PDRB berjalan tergantung pada pengelolaan produktivitas, tenaga kerja, dan akumulasi modal sesuai dengan aktivitas perekonomian. Ketika keseluruhan indikator berjalan secara simultan dengan optimal tentu akan menghasilkan output yang dapat meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (Mustofa dan Faizin, 2025).

Fokus penelitian ini di Wilayah pesisir selatan Jawa Timur yang memiliki letak yang strategis berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah yang memiliki 8 Kabupaten yaitu Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung. Potensi ekonomi daerah tersebut didukung dari potensi sumber daya alam, pariwisata, perikanan, dan pertanian tentunya sangat unggul pada wilayah ini (Sukandar *et al.*, 2016). Berdasarkan karakter geografisnya wilayah tersebut berpotensi bencana, sehingga menyebabkan tantangan dalam fluktuasi harga dan aksesibilitas barang dan jasa (Jawad dan Harto, 2024). Pemerataan pada hasil pembangunan sehingga masih merasakan akses dan fasilitas yang terbatas. Selain itu, sektor primer masih mendominasi dan lebih rentan terhadap fluktuasi harga pada investasi, inflasi, dan kebijakan fiskal. Dalam memberikan bukti empiris awal terkait ketidakseimbangan volume ekonomi dapat dilihat melalui gambar 1.1 perbandingan nilai ekonomi riil PDRB ADHK antar kedua wilayah tersebut.

Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto ADHK (dalam milyar rupiah) Pembagian Wilayah Pesisir di Jawa Timur (2015-2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

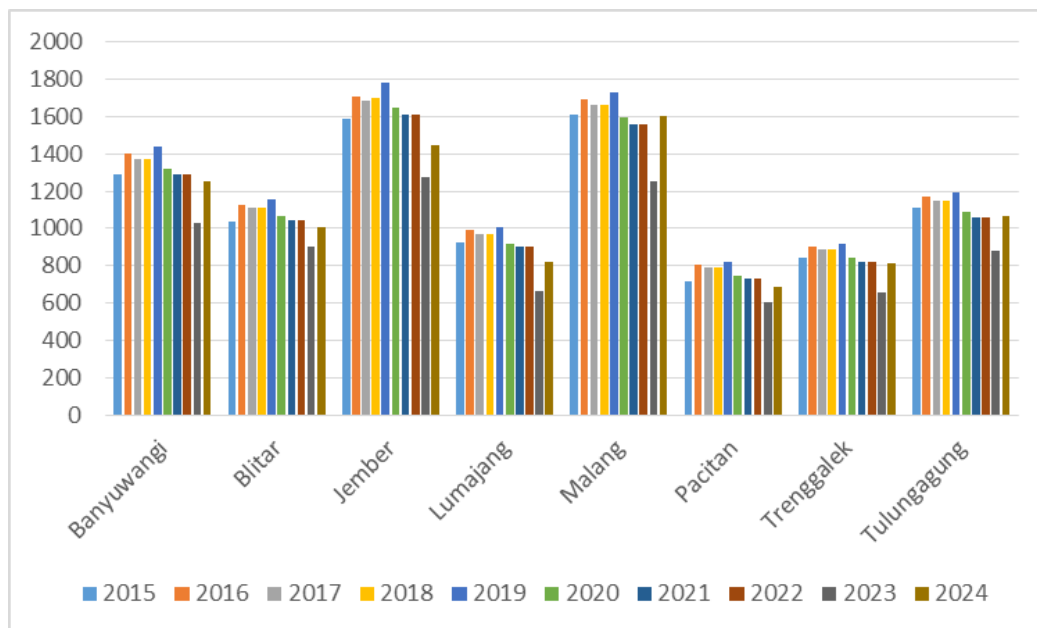
Berdasarkan Gambar 1.1 perkembangan PDRB ADHK mengalami dinamika yang berbeda terlihat dari masing-masing wilayah. Sebagian daerah mampu mencatat PDRB tinggi, sementara daerah lain justru mengalami PDRB yang lebih rendah pada periode yang sama. PDRB pesisir selatan berbanding terbalik dengan utara, dengan mencapai Rp.865.271 milyar sementara wilayah selatan nilai Rp.339.910 milyar belum mencapai puncak dengan pertumbuhan produksi dan dominasi wilayah utara masih berlanjut. Hal tersebut menjelaskan pesisir selatan ada pada jurang kempungan pada volume PDRB dibanding output utara. Peningkatan tergantung pada percepatan produktivitas ekonomi, dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi utama baik faktor internal ataupun eksternal.

Perbedaan signifikan tersebut menggarisbawahi perlunya insentif yang terstruktur untuk mempercepat penentu makroekonomi riil di wilayah selatan. Kurangnya pengembangan infrastruktur dan industri hilirisasi tentu memerlukan

tingkat investasi yang tinggi. Terlihat saat ini mulai terjadi peningkatan ekonomi dari adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan. Hal tersebut mencerminkan bahwa pesisir selatan tergantung pada ketersediaan modal dan tenaga kerja sebagai sumber daya produksi mendasar. Dalam partisipasinya tergolong tinggi namun masih didominasi oleh sektor informal artinya ekonomi di wilayah tersebut belum berjalan optimal.

Adanya perbedaan masing-masing wilayah tentu perlu adanya peran pemerintah dalam pemenuhan modal publik. Pemerintah pusat mengeluarkan Dana Alokasi Umum sebagai instrumen fiskal daerah sesuai dengan kebutuhan yang diukur melalui jumlah penduduk, luas wilayah, dan PDRD sebagai upaya mengurangi ketimpangan (Maulana Langi, 2022). Sebagai sumber pendapatan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintahan mulai dari gaji aparatur negara sipil, pemeliharaan asset, dan program layanan seperti kesehatan dan pendidikan, serta menjadi pilar utama dalam pendanaan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan raya, irigasi pertanian, jaringan listrik dan fasilitas air bersih dalam peningkatan kapasitas produksi ekonomi regional melalui investasi publik (Maulena, Kheriah dan Abral, 2023).

Gambar 1. 2 Dana Alokasi Umum (dalam milyar rupiah) di Wilayah Pesisir Selatan Provinsi Jawa Timur (2015-2024)



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2025 (data diolah)

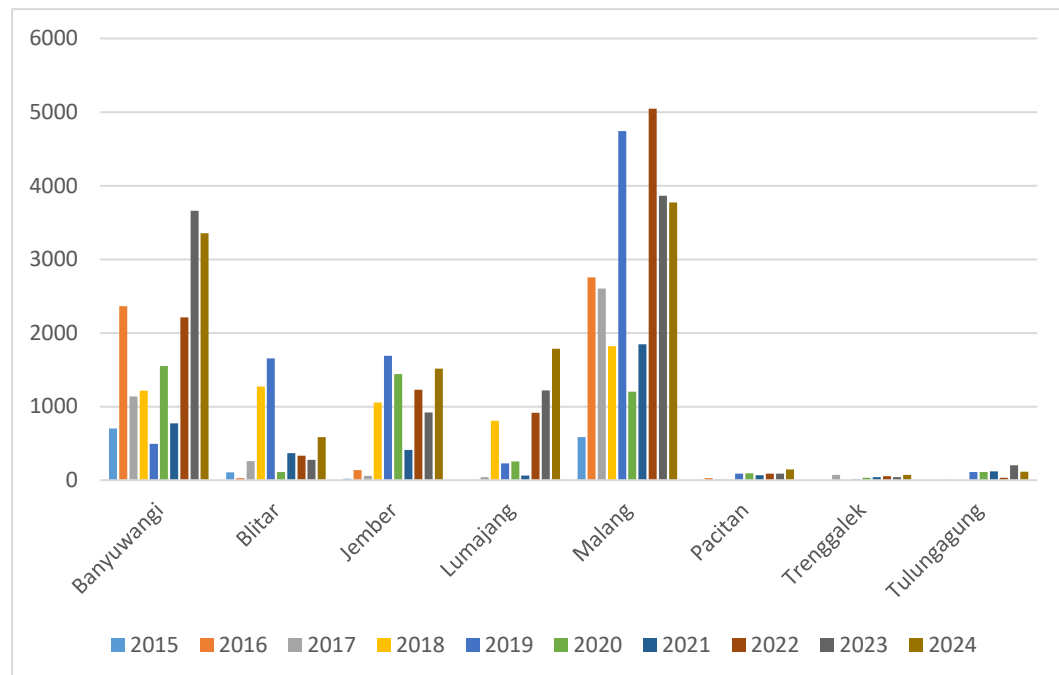
Gambar 1.2 Dana Alokasi Umum terlihat fluktuatif pada 8 Kabupaten di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur. Pada tahun 2015 rata-rata nilai DAU berkisar Rp.1139.518 milyar, pada fase pandemi naik hingga Rp.1256.143 milyar, dan di tahun terakhir menurun menjadi Rp.1086.627 milyar. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian alokasi untuk menutup celah fiskal pada fase sebelum hingga sesudah pandemi dan pembangunan infrastruktur baru. Peran DAU sangat penting sebagai penggerak permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah daerah sebagai instrumen pembiayaan untuk layanan publik dan infrastruktur. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut bukan hanya sekedar bergantung pada tingkat DAU saja tetapi juga pada tingkat efektivitas pengelolaannya sebagai pengeluaran produktif yang mempengaruhi aktivitas ekonomi (Agatyan, 2021).

Transfer fiskal seperti DAU memiliki peluang sebagai penggerak ekonomi riil melalui penambahan biaya pemerintah daerah. Penelitian Utomo dan

Tambunan, (2024) menjelaskan bahwa DAU memiliki hubungan erat dengan investasi baik asing ataupun dalam negeri, serta kelompok usia kerja aktif secara ekonomi dapat memperkuat pentingnya DAU dalam dinamika pembangunan regional. Sederhananya DAU menjadi pembuka jalan yang membuat investasi lebih efektif dan membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dalam peningkatan produktivitas dan ekonomi daerah. Ketika pemerintah daerah menerima DAU dari pemerintah pusat naik dengan demikian PDRB yang ada di wilayah tersebut juga meningkat makanya peran DAU penting dalam percepatan struktur ekonomi di wilayah tersebut.

Selain pengeluaran pemerintah, dalam pertumbuhan ekonomi investasi menjadi peran penting dalam menggerakkan akumulasi modal yang bisa menaikkan kinerja produksi. Perlunya pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran agar bisa berjalan lebih optimal dengan mengalihkan ke pembiayaan yang diutamakan. Suatu negara tentu membutuhkan nilai investasi untuk menutup meningkatkan pendapatan. Investasi baik dalam dan luar negeri secara langsung ataupun investasi portofolio. Berdasarkan penelitian ini, investasi berfungsi menjadi modal tambahan pendorong kapasitas produksi, membuka kesempatan kerja, dan mendorong output PDRB melalui peningkatan investasi, transfer teknologi canggih pada produksi global.

Gambar 1. 3 Investasi (dalam milyar rupiah) di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur (2015-2024)



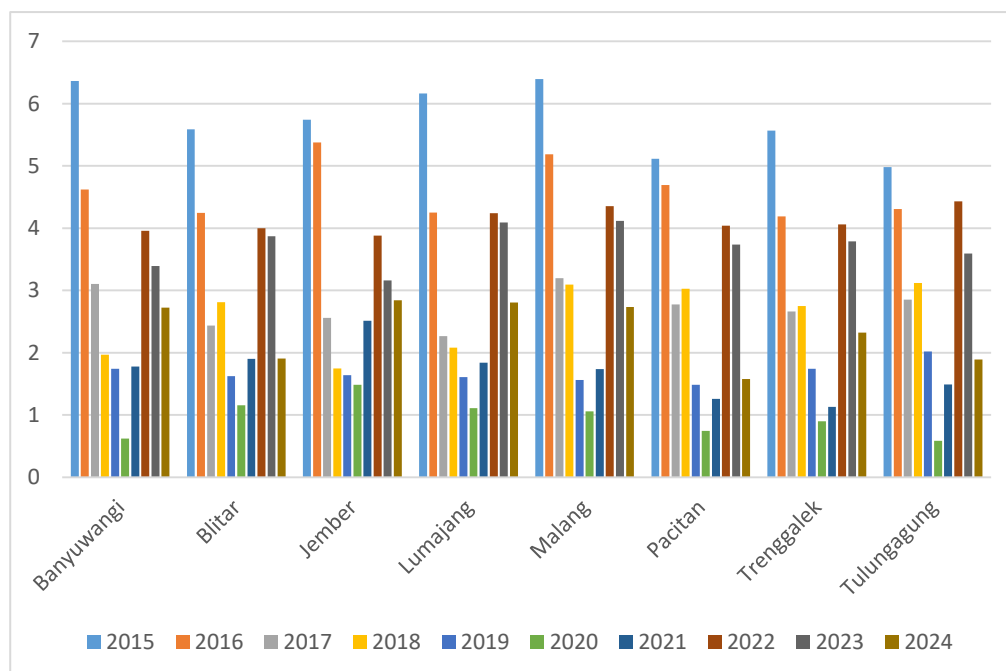
Sumber: (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2026)

Gambar 1.3 menunjukkan investasi berjalan dengan fluktuatif mulai periode 2015 hingga 2024. Terlihat investasi mengalami peningkatan tajam, pada fase awal tahun 2015 hanya di kisaran Rp. 177.678 milyar, sempat mengalami peningkatan tajam di tahun 2019 mencapai Rp. 1126.683 milyar kemudian meningkat hingga tahun terakhir penelitian 2024 mencapai Rp. 1418.170 milyar. Hal tersebut menjadi bukti dengan adanya pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) mampu menarik minat investasi pada sektor pariwisata (Saputra *et. al*, 2024). Meskipun sempat terjadi pandemi keadaan itu diitik fase lemahnya minat investor asing karena ketidakpastian ekonomi global dan penyesuaian kebijakan domestik. Begitupun tahun berikutnya setelah adanya pandemi, sebagai tahun penyesuain dalam tahap pemulihan sehingga beberapa investor tetap melihat Jawa Timur sebagai lokasi yang bagus untuk penanaman modal.

Dari perspektif pertumbuhan ekonomi daerah, pola ini memperlihatkan kontribusi investasi terhadap kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan pesisir selatan paling tinggi pada tahun terakhir pengamatan. Oleh karena itu, dampak investasi terhadap pertumbuhan PDRB berpotensi jauh lebih kuat pada tahun terakhir dibanding dengan periode 2015-2021. Secara keseluruhan investasi memiliki potensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, namun harus tetap menciptakan lingkungan yang kondusif melalui regulasi yang ramah dan insentif strategis (Safitri *et al.*, 2025). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan PDRB tidak bisa dipastikan dapat merata diseluruh wilayah, karena efektivitas ditentukan dari karakteristik struktur ekonomi lokal.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Basalama (2024) dalam menganalisis pengaruh investasi terhadap PDRB di Jawa Barat bahwa efek PMA dan PMDN signifikan, artinya investasi berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun, upaya peningkatan tersebut harus didukung dengan peran pemerintah dalam mempromosikan sektor strategis dilakukan melalui investasi domestik. Perkembangan makroekonomi suatu wilayah terkait erat dengan perubahan tingkat harga umum yang diwakili oleh indikator inflasi. Inflasi merupakan barometer stabilitas ekonomi dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Selain itu, inflasi moderat dan terkendali seringkali dapat mengindikasikan perkembangan permintaan yang positif dalam ekonomi lokal. Peningkatan harga secara terus-menerus dapat mendistorsi PDRB. Hal tersebut penting untuk menentukan sejauhmana pertumbuhan PDRB di wilayah pesisir selatan memerlukan variabel inflasi secara empiris.

Gambar 1. 4 Inflasi (dalam milyar rupiah) di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur (2015-2024)



Sumber: BPS Jawa Timur, 2025 (data diolah)

Berdasarkan 1.4 menunjukkan inflasi 8 kabupaten wilayah pesisir selatan jawa timur mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 inflasi mencapai angka 5% seiring berjalannya waktu menurun hingga 2024 menjadi 2,3%. Meskipun sempat terjadi krisis jangka pendek di tahun 2020 akibat pandemi inflasi menyentuh angka, ketika ekonomi mulai mengalami pemulihan pada 2022 peningkatan permintaan tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan kenaikan harga hampir diseluruh kabupaten. Selama periode pengamatan, fluktuasi harga yang tidak stabil dapat menciptakan ilusi moneter ketika menilai kinerja pembangunan daerah. Selain itu, fase sebelum dan sesudah pembangunan Jalan Lintas Selatan bekerja dengan cukup baik. Dimana JLS mengurangi biaya logistik dan transportasi yang bertindak sebagai peredam inflasi sisi penawaran (Murti *et al.*, 2026) . Namun, fenomena ini menyoroti bahwa stabilitas harga produksi bagi nelayan dan petani di wilayah ini sering terpengaruh oleh kelangkaan bahan bakar diesel bersubsidi dan kapal, serta

oleh biaya tambahan pupuk. Ketika biaya-biaya ini meningkat, efisiensi jalur logistik yang ditawarkan oleh JLS menjadi suboptimal. Hal ini karena nelayan lokal terpaksa menambatkan kapal mereka karena biaya operasional per perjalanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan margin keuntungan mereka.

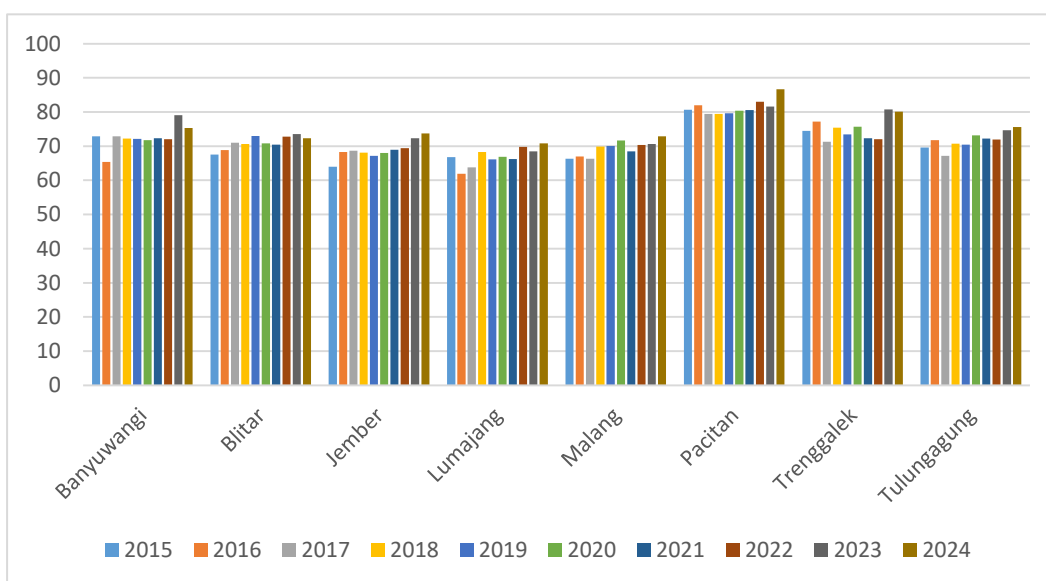
Penelitian oleh Arintoko dan Kadarwati, (2022) menunjukkan bahwa guncangan inflasi merupakan sebuah mekanisme transisi makroekonomi yang cukup sensitif karena berpengaruh langsung dengan perubahan pertumbuhan ekonomi riil daerah. Dalam studi tersebut menegaskan bahwa fluktuasi harga cenderung kontraktif dalam mengoreksi kapasitas produksi dan mengganggu keseimbangan pertumbuhan regional. Dengan demikian, hubungan tersebut mendorong pentingnya konektivitas spasial, seperti strategi pembangunan infrastruktur dan harus dievaluasi karena dinamika inflasi regional.

Pergerakan tingkat harga ini sangat penting dalam memaksimalkan potensi dari 8 kabupaten tersebut. Sektor primer yang unggul di wilayah tersebut sangat sensitif terhadap guncangan rantai pasokan dan perubahan biaya produksi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur, perluasan pertanian, dan pertumbuhan pariwisata dapat menarik arus modal besar-besaran sehingga menyebabkan lonjakan permintaan barang jasa. Dinamika inflasi mencerminkan fluktuasi harga pasar yang secara langsung memengaruhi lapangan kerja di sektor riil (Athirah dan Sa'roni, 2023). Perluasan produksi dalam memenuhi permintaan pasar secara otomatis dapat meningkatkan tenaga kerja. Ekspansi ekonomi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong individu usia kerja untuk memasuki pasar kerja. Penduduk terintegrasi ke dalam siklus produksi yang diukur menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Berfungsi sebagai indikator

kunci yang menghubungkan fluktuasi harga makroekonomi dengan produktivitas masyarakat setempat.

Dalam perspektif modal manusia, peningkatan TPAK sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan mendukung pertumbuhan. Meskipun, peningkatan TPAK butuh jangka yang relatif lama dan dukungan kebijakan lebih konsisten sehingga pertumbuhan ekonomi daerah perlu diuji secara empiris. Perbedaan tersebut mewakili kualitas sumber daya dalam tenaga kerja berpotensi menjadi salah satu penyebab utama perbedaan kinerja pertumbuhan ekonomi antar daerah (Lewis, 1954).

Gambar 1. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Inflasi (dalam milyar rupiah) di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur (2015-2024)



Sumber: BPS Jawa Timur, 2025 (data diolah)

Gambar 1.5 terlihat TPAK terlihat fluktuatif setiap tahun mulai dari 2015 mencapai 70% dimana setiap tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2024 berada di angka 75%. Adanya keterbatasan pada akses pendidikan tinggi dan memiliki produktivitas yang rendah dalam lingkup informal, sehingga aktivitas ekonomi tinggi masih kurang dalam penyediaan lapangan kerja tetap dan

terstruktur. Perbedaan tersebut mewakili kualitas sumber daya dalam tenaga kerja berpotensi menjadi salah satu penyebab utama perbedaan kinerja pertumbuhan ekonomi antar daerah. Terlebih lagi di wilayah pesisir tenaga kerja sebagian di sektor perikanan dan usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan (Sukandar *et al.*, 2016). Adanya keterbatasan itu, tenaga kerja saja tidak cukup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung oleh akumulasi modal. Pertumbuhan ekonomi riil tidak hanya ditetapkan dari aspek eksternal saja terutama oleh inovasi dan pengetahuan yang dihasilkan secara endogen di dalam sistem ekonomi.

TPAK menjelaskan persentase angkatan kerja terhadap penduduk produktif kerja berusia minimal 15 tahun, sudah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Pada suatu daerah jika TPAK meningkat cenderung memperlihatkan struktur ekonomi lebih cepat, peningkatan efisiensi tenaga kerja, dan daya tarik yang lebih besar untuk investasi. Menurut penelitian oleh Purba *et al.*, (2024) menjelaskan di Provinsi Sumatera Utara TPAK mempengaruhi pertumbuhan PDRB secara signifikan, artinya ketika terjadi peningkatan maka secara bersamaan ekonomi juga meningkat.

Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang terkait pertumbuhan wilayah selatan berdasarkan lapangan kerja informal dan struktur pembiayaan keuangan regional yang kontradiktif. Di satu sisi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di delapan kabupaten selatan relatif tinggi, mencerminkan proporsi besar penduduk yang aktif terlibat dalam pertanian subsisten. Namun, surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan maritim tidak berkorelasi dengan kualifikasi formal atau modernisasi fasilitas produksi, sehingga menimbulkan tanda-tanda kuat pengangguran tersembunyi dan mengurangi produktivitas marjinal pekerja.

Di sisi lain, kapasitas pendapatan daerah (PAD) yang terbatas di daerah non-industri telah menyebabkan ketergantungan keuangan lokal yang nyata pada transfer dari Dana Alokasi Umum pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi kecenderungan penundaan fiskal yang semakin meningkat, efektivitas instrumen kebijakan fiskal ini sering menjadi subjek perdebatan akademis. Alokasi anggaran DAU sebenarnya digunakan untuk pengeluaran rutin birokrasi dan administrasi daerah, alih-alih mengalir langsung ke investasi infrastruktur fisik untuk nelayan dan petani tradisional. Untuk menilai efisiensi perekrutan tenaga kerja dan menentukan efek pengganda insentif fiskal terhadap penciptaan nilai dalam ekonomi riil pesisir, sangat penting untuk memeriksa variabel TPAK dan DAU dalam model ini secara simultan.

Penelitian terdahulu oleh Dewi dan Purwanti, (2025) terkait dengan determinan pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan dari investasi dan TPAK dalam mendukung output perekonomian. Peningkatan tersebut diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Berbeda dengan penelitian Maulana, Syahnur dan Abrar, (2025) mencakup 34 provinsi di Indonesia. Menemukan adanya ketiga variabel DAU, investasi, dan TPAK secara linier berpengaruh positif dan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian tersebut menggunakan data yang cukup luas artinya hasil tersebut tidak bisa memperhitungkan keterbatasan fiskal dan perilaku modal pada daerah bukan industri yang mengalami kendala tersebut.

Anggraeni dan Rochmatullah, (2024) mendapatkan temuan terkait determinasi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Dana bagi hasil, alokasi umum dan khusus secara positif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fitrianti (2024) bahwa DAU dalam jangka pendek memiliki pengaruh negatif 20 provinsi di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan DAU tidak sesuai target dalam mendukung aktivitas ekonomi. Sedangkan pada penelitian dengan menjelaskan variabel inflasi yang dilakukan oleh Iqbal, Hakim dan Anggraeni, (2025) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB nominal. Menjelaskan bahwa fluktuasi inflasi tidak berjalan stabil berdasarkan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, peran pemerintah penting dalam melakukan pengendalian harga barang dan jasa dalam ketidakpastian ekonomi di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur. Dengan demikian, penelitian ini terdapat **research gap** dari rujukan yang ada. Berbeda dari studi sebelumnya, belum ada penelitian yang menganalisis secara simultan DAU, Investasi, Inflasi, dan TPAK. Banyak telaah yang hanya menganalisis masing-masing variabel secara terpisah tanpa menggabungkan keterkaitan antara variabel tersebut.

Berdasarkan celah penelitian yang ada, penelitian ini memiliki beberapa kebaruan **novelty**. Pertama, menganalisis pertumbuhan ekonomi riil di wilayah pesisir secara ekonomi melalui peran fiskal pemerintah yang dijelaskan dengan variabel Dana Alokasi Umum, Investasi, Inflasi, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kedua, menggunakan pembaruan data waktu dimana periode ini sangat penting karena mencakup fase implementasi dan integrasi lengkap proyek strategis nasional Jalan Lintas Selatan. Studi sebelumnya hanya menangkap data sekunder hingga tahun 2021, ketika ekonomi regional masih dalam tahap awal pemulihan

pasca-pandemi. Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam melihat transformasi spasial akibat transisi perekonomian (JLS). Pembuat kebijakan regional memerlukan bukti empiris objektif untuk menginformasikan kebijakan fiskal, strategi investasi swasta, dan langkah-langkah pengendalian stabilitas harga. Studi sebelumnya yang diterbitkan beberapa tahun lalu tidak memperhitungkan perkembangan ini, karena data sekunder masih belum tersedia karena pandemi global dan fase konstruksi jalan yang suboptimal. Ketiga, perbedaan terletak pada rekonstruksi spesifikasi model fungsi produksi regional. Dengan menggunakan pendekatan ekonometrik data panel dengan model efek tetap, konteks ini menarik untuk melihat perkembangan ekonomi regional yang kuat, baru, dan sangat representatif tentang perkembangan masa depan koridor selatan di Jawa Timur.

Urgensi penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana guncangan pandemi, pengoperasian penuh Jalan Lintas Selatan (JLS) antara tahun 2015 dan 2024 akan memengaruhi elastisitas produksi riil di pesisir selatan Jawa Timur. Periode ini sangat berharga secara strategis, karena mencakup fase penting konektivitas regional dan secara ilmiah menyelidiki apakah peningkatan aksesibilitas dapat mengubah produktivitas marginal investasi swasta melalui efek pengganda spasial, atau justru hal itu terhambat oleh hambatan fiskal yang diakibatkan oleh keterbatasan pengeluaran investasi regional dan distorsi inflasi logistik hulu yang berdampak negatif pada produktivitas tenaga kerja di ekosistem agribisnis informal tradisional.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan dalam mempelajari faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Determinasi Produk Domestik Regional Bruto di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur berdasarkan Dana Alokasi Umum, Investasi, Inflasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan sebelumnya, diambil beberapa ringkasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?
2. Apakah Investasi memiliki pengaruh terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?
3. Apakah Inflasi memiliki pengaruh terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?
4. Apakah TPAK memiliki pengaruh terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan ringkasan masalah yang ada, sehingga didapatkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?

2. Menganalisis pengaruh Investasi terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?
3. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?
4. Menganalisis pengaruh TPAK terhadap PDRB di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur?

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Data penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu, Dana Alokasi umum (DAU) sebagai representasi stimulus fiskal, Investasi menjelaskan akumulasi modal fisik (PMA dan PMDN), Inflasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai penjelas dalam potensi penawaran tenaga kerja.
2. Penelitian ini fokus pada di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur yang terdiri dari 8 Kabupaten, antara lain: Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Trenggalek, Pacitan, Tulungagung. Berdasarkan karakteristik ekonomi sektor primer dan transformasi Jalur Lintas Selatan (JLS). Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perubahan infrastruktur dalam mengoptimalkan modal dan tenaga kerja dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi.
3. Menggunakan data 10 tahun selama periode 2015-2024. Periode tersebut dipilih untuk melihat bagaimana dinamika ekonomi pada wilayah pesisir selatan jawa timur mulai dari awal pembangunan, pandemi Covid'19, hingga fase pemulihan dan operasional penuh JLS yang mendorong peningkatan investasi dan produktivitas ekonomi maritime.

4. Pada analisisnya penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dalam melihat determinasi dalam variabel DAU, investasi, inflasi dan TPAK terhadap PDRB ADHK di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh DAU, investasi, Inflasi dan TPAK terhadap PDRB di Wilayah pesisir selatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur dengan menerapkan ilmu selama perkuliahan.
2. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mempertimbangkan dan menyusun strategi antara DAU, investasi, inflasi, dan peningkatan tenaga kerja dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi peneliti seterusnya, penelitian ini mampu sebagai sumber penelitian berikutnya khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.